

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAN MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU
(Studi Usaha Ekonomi Kelurahan)**

Oleh:

Dia Meirina Suri dan Nurmasari

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru (Studi Program Usaha Ekonomi Kelurahan). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisa kualitatif teknik triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor standar dan tujuan, sumberdaya, aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi / sikap pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kelurahan maharatu melaksanakan dengan baik standar pelaksanaan program, memiliki sumberdaya manusia yang mau bekerja dengan sesuai dengan tugasnya, sedangkan kelurahan Sidomulyo Barat dan Tanah Datar belum melaksanakan program sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan selain itu sumberdaya yang dimiliki tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci : Kebijakan, Pemberdayaan, Ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors that influence the implementation of community empowerment in Pekanbaru City (Study of Economic Village Business Program). This research method using qualitative descriptive approach with qualitative analysis technique triangulation technique. The results of the study found that the implementation of Urban Economic Village program in Pekanbaru City is influenced by standard and objective factors, resources, observation activities and interorganizational communication, implementing characteristics, disposition / attitude of executor and economic, social and political conditions. Kelurahan maharatu implement well the program implementation standards, have the human resources who want to work in accordance with their duties, while the village of West Sidomulyo and Tanah Datar has not implemented the program in accordance with the standards and policy objectives other than the resources held are not responsible for the tasks that must be implemented, so that the implementation of the Village Economic Business program is not going well.

Key words : Policy, Empowerment, Economics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai macam program peningkatan perekonomian untuk mengatasi masalah kemiskinan namun angka kemiskinan masih saja tinggi, hal ini dikarenakan program yang dilakukan oleh pemerintah hanya menjadikan masyarakat sebagai penerima program tanpa melibatkan masyarakat bertanggung jawab untuk meningkatkan penghasilan mereka.

Pemerintah mulai melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan memberdayakan

masyarakat itu sendiri, program pemberdayaan masyarakat ini disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan, program ini menuntut masyarakat untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat dengan system pinjaman.

Di Kota Pekanbaru program pemberdayaan masyarakat ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 dan sampai dengan sekarang (Tahun 2018), jumlah kelurahan yang sudah mendapatkan bantuan program ini adalah 58 (lima puluh delapan) kelurahan, artinya seluruh kelurahan di Kota Pekanbaru telah melaksanakan program pemberdayaan ini.

Apabila dilihat dari jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah tidak ada perbedaan antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lainnya, namun terjadi perbedaan pencapaian keberhasilan masing – masing kelurahan dalam menjalankan program Usaha Ekonomi Kelurahan, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru (Studi Program Usaha Ekonomi Kelurahan)*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “ Faktor – Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekanbaru ? (Studi Program Usaha Ekonomi Kelurahan) “

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kota Pekanbaru (Studi Program Usaha Ekonomi Kelurahan)

D. Studi Pustaka

Yogia (2016) dalam penelitiannya yang mengkaji tentang pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat ditemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru ternyata tidak seluruh kelurahan berhasil dalam menjalankan program kebijakan tersebut, hal ini disebabkan karena kurang seriusnya pengelola program yang bertanggung jawab pada kelurahan tersebut

Arlisa (2015) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan di kelurahan Sidomulyo ditemukan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya adalah 1) sumberdaya manusia, 2) kurangnya pengalaman, 3) kurangnya kesadaran masyarakat.

Syamsidar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengelolaan usaha ekonomi kelurahan di Kabupaten Siak ditemukan bahwa faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah 1) Sumberdaya Manusia, 2) Karakter pemanfaat, 3) sumberdaya finansial

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan

itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003 : 13) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif hanya meneliti data yang berbentuk kata-kata dan biasanya merupakan proses yang berlangsung lama. Teknik analisa kualitatif yang digunakan adalah teknik triangulasi, yakni teknik untuk melihat kesahihan bersama dan korelasi yang kuat antar data dan dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh faktor standar dan tujuan, sumberdaya, aktivitas pengamatan dan komunikasi interorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi / sikap pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kelurahan maharatu melaksanakan dengan baik standar pelaksanaan program, memiliki sumberdaya manusia yang mau bekerja dengan sesuai dengan tugasnya, sedangkan kelurahan Sidomulyo Barat dan Tanah Datar belum melaksanakan program sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan selain itu sumberdaya yang dimiliki tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakan, sehingga pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan tidak berjalan dengan baik.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru

Didalam petunjuk teknis program pemberdayaan desa / kelurahan dapat dilihat bahwa ketentuan dalam memberikan pinjaman untuk masyarakat yang akan memanfaatkan dana kelurahan yang dikelola Usaha Ekonomi Kelurahan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

“Ada beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat yang akan meminjam, sesuai dengan petunjuk yang ada, jadi sebelum dana diserahkan kami cek terlebih dahulu data dari calon peminjam tersebut” (wawancara dengan informan, 3 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola usaha ekonomi kelurahan pada Kelurahan Maharatu

dapat diketahui bahwa setiap masyarakat yang akan melakukan peminjaman dana harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan, adapun syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang akan dipinjam, contohnya untuk peminjaman Rp satu juta, masyarakat cukup melampirkan KK sebagai jaminan serta proposal yang berisi gambaran mengenai usaha yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan pada Kelurahan Maharatu sudah sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selain itu pada kelurahan Maharatu, setiap masyarakat yang akan memanfaatkan dana atau meminjam bantuan modal akan disurvei terlebih dahulu dengan melihat proposal yang sudah diajukan.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia dan dana yang tersedia. Sumberdaya manusia sangat mempengaruhi kesuksesan program ini, karna untuk menjalankan program usaha ekonomi kelurahan dibutuhkan orang – orang yang memahami bagaimana menjalankan Usaha Ekonomi Kelurahan ini baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Setelah dilakukan penelitian pada Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Tanah Datar diketahui bahwa jumlah sumberdaya manusianya sudah memadai, jumlah pengelola usaha ekonomi kelurahan yang menjalankan program ini sudah mencukupi.

“Sebelum memberikan dana pinjaman kepada masyarakat, kami terlebih dahulu melihat data calon peminjam agar tidak terjadi penunggakan, namun apabila ada yang melaukan penunggakan maka kami akan lakukan kunjungan untuk melakukan penagihan” (wawancara dengan informan, tanggal 3 April 2018)

Dari segi jumlah pengelola, tiga kelurahan tersebut memiliki jumlah yang sama, namun perbedaan terdapat pada kemampuan sumberdaya manusianya, pada Kelurahan Maharatu, pengelola sangat peduli dengan pengembangan usaha ekonomi kelurahannya, hal ini data dilihat dari kepedulian mereka terhadap masyarakat peminjam dana, pengelola memberikan penyuluhan dalam mengembangkan usaha masyarakat, menyeleksi dengan baik masyarakat yang akan meminjam dana dan melakukan penagihan terhadap masyarakat yang telat melakukan pembayaran.

C. Aktivitas pengamatan dan komunikasi antar organisasi terkait kegiatan – kegiatan yang dilakukan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa keterlibatan BPPM-KB ini dalam hal pengembangan Usaha Ekonomi Kelurahan sangatlah kurang, kunjungan ke kelurahan jarang dilakukan sehingga pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan tidak mendapatkan pembinaan dan pengarahan bagaimana melaksanakan program pemberdayaan tersebut. Menurut pengakuan salah seorang pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Tanah Berlian yang berada di Kelurahan Tanah Datar, diketahui bahwa Usaha Ekonomi Kelurahan disana tidak pernah dikunjungi oleh pemerintah untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha ekonomi tersebut, mereka hanya meminta laporan perkembangan usaha setiap tahunnya tanpa melakukan pengawasan maupun memberikan pembinaan dan arahan.

“kami menjalankan usaha ekonomi kelurahan ini berdasarkan petunjuk yang diberikan, bahwa ada bantuan modal untuk masyarakat yang akan dipinjamkan sebagai modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan, yang penting mereka mengajukan surat atau proposal untuk pengembangan usaha, yang lain – lainnya kami tidak tahu” (wawancara dengan informan, tanggal 2 Maret 2018)

Pertemuan pengelola dengan BPPM – KB hanya terjadi pada saat pertama dibentuknya Usaha Ekonomi Kelurahan, seharusnya pengawasan dan pembinaan harus sering dilakukan agar Usaha Ekonomi Kelurahan dapat berkembang dengan baik dan masyarakat pengguna atau pemanfaat menjadi lebih banyak. Sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan ini adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomiannya dengan memberikan pinjaman modal, namun pengawasan terhadap penggunaan dana tetap harus dilakukan sehingga dana dapat berkembang dan semakin banyak yang bisa digulirkan.

D. Karakteristik pelaksana atau sifat dari instansi pelaksana

Masing – masing pelaksana seharusnya memahami peran mereka sesuai dengan standar dan petunjuk pelaksanaan program ini, BPM – KB seharusnya menjalankan perannya sebagai pengawas dan melakukan kunjungan rutin ke setiap kelurahan, memberikan arahan dan masukan atau penyuluhan kepada pelaksana program apabila organisasi tingkat bawah tersebut tidak melakukan tugas sesuai dengan standar yang sudah ada.

E. Disposisi atau sikap pelaksana

Dilihat dari perspektif teori Meter dan Horn disposisi atau sikap pelaksana dapat diartikan sebagai pemahaman pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi pemahaman dari pelaksana dalam menjalankan tugasnya yaitu :

1. Pemahaman, pendalaman dan pengetahuan
2. Respon
3. Intensitas tanggapan terhadap kebijakan.

Hal ini sangat menentukan keberhasilan implementasi, sebab hal ini berkaitan dengan persepsi pelaksana dalam menjalankan program yang sudah dibuat.

Pada Kelurahan Maharatu, pengelola sangat memahami dan bertanggung jawab dalam menjalankan Usaha Ekonomi Kelurahan, hal ini dapat dilihat dari pernyataan ibu Yuharna :

“kami bekerja sesuai dengan tupoksi serta acuan yang diberikan kepada kami, meskipun ada beberapa pekerjaan yang tidak ada dalam ketentuan tapi penting untuk dilakukan seperti melakukan penagihan, karna kalau tidak dilakukan penagihan maka akan banyak terdapat tunggakan” (wawancara dengan informan, 4 Juni 2018)

Hal serupa juga dituturkan oleh Ibu Susi sesuai dengan kutipan wawancara berikut ini :

“masing – masing pengelola sudah paham dengan apa yang menjadi tugasnya, jadi tanpa disuruh mereka selalu datang dan mengerjakan pekerjaan masing – masing, yang penting mereka hadir di kantor karna banyak masyarakat yang akan berurusan” (wawancara dengan informan, tanggal 21 Mei 2018)

F. Kondisi Ekonomi, sosial dan Politik

Kondisi perekonomian masyarakat menengah kebawah diharapkan mengalami perubahan dengan adanya program dana bergulir ini, demikian juga sebaliknya, dengan kondisi ekonomi yang kurang baik tentu saja masyarakat akan membutuhkan program dana bergulir sehingga masyarakat dapat memanfaatkan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Berikut hasil wawancara dengan pelaksana pada Kelurahan Maharatu:

“Kondisi masyarakat yang memiliki usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya tentu saja program Usaha Ekonomi Kelurahan ini sangat bermanfaat, ini bisa kita lihat dari banyaknya jumlah pemanfaat atau peminjam modal setiap tahunnya, coba saja dilihat pertumbuhan jumlah peminjam”

(Wawancara dengan informan, Tanggal 4 Juni 2018)

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara berikut ini:

“Ekonomi masyarakat dikelurahan ini meningkat, ini tentu saja dikarenakan adanya bantuan untuk penambahan modal mereka, mereka bisa menambah dagangannya bagi masyarakat yang berdagang, trus kalo petani mereka bisa menambah untuk menyewa lahan” (Wawancara dengan informan, Tanggal 9 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dengan adanya program usaha ekonomi kelurahan ini, masyarakat Kelurahan Maharatu dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sujianto., 2009., *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri.*, Alaf Riau., Pekanbaru.
- Sumaryadi Nyoman., 2005., *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Penerbit Citra Utama., Jakarta.
- Tachjan., 2006., *Implementasi Kebijakan Publik.*, Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad., Bandung.
- Usman Sunyoto., 2004., *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Arlisa., 2015., *Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK - SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .*, Jom Fisip Vol. 2 No. 2
- Syamsidar, 2015, *Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam di Desa gabung makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*, Jom Fisip Vol. 3 No. 1
- Yogia, Moris Adidi, 2016, *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru*, Laporan Penelitian LP UIR